



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 445388, E-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 161/S/XVIII.JMB/5/2024
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

Jambi, 4 Mei 2024

Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat
di
Kuala Tungkal

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah terkait penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, properti investasi dan akuntansi kerugian daerah yang mengakibatkan penyajian Laporan Keuangan BLUD belum didukung dengan kebijakan akuntansi dan potensi salah saji atas penyajian properti investasi dan akuntansi kerugian daerah yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

- b. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis pada sebelas pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.163.832.525,82; dan
- c. Pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada dua SKPD belum memadai yang mengakibatkan penyajian persediaan BMHP pada RSUD KH. Daud Arif tidak andal serta penggunaan persediaan LPJU pada Dinas Perakim tidak didukung dengan dokumen dan pencatatan yang andal.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tanjung Jabung Barat antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemutakhiran kebijakan akuntansi sesuai perkembangan SAP;
- b. Kepala Dinas PUPR selaku PA untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.163.832.525,82; dan
- c. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait persediaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 18.A/LHP/XVIII.JMB/5/2024 dan Nomor 18.B/LHP/XVIII.JMB/5/2024, masing-masing tertanggal 4 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jambi
Kepala Perwakilan,



Paula Henry Simatupang 
NIP 197301111998031001

Tembusan:

- 1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
- 2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta
- 3. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta
- 4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK di Jakarta
- 5. Yth. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal